

PERUBAHAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM ANALISIS KETERLIBATAN POLITIK BERBASIS PEMBANGUNAN DESA YANG BERKELANJUTAN

Kaamiliaa Dewi¹, Muhammad Eko Atmojo²

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia¹

Department of Government and Administration Affairs

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia²

E-mail: kaamiliaadewi01@gmail.com¹

ABSTRAK

Penelitian ini secara tujuan untuk mengkaji pendekatan partisipatif masyarakat berbasis teknologi dalam konteks pembangunan desa berkelanjutan. Fokus utama penelitian adalah mengeksplorasi transformasi tata kelola pemerintahan desa dengan penekanan pada aspek pembangunan berkelanjutan. Metode yang dipergunakan ialah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan atau penghimpunan data melalui dokumentasi. Hasil dari pelaksanaan penelitian memberi petunjuk bahwa reformasi sistem tata kelola pemerintahan desa memegang peranan penting dalam mencapai pembangunan desa berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat yang memperhatikan aspek lingkungan menjadi landasan utama dalam upaya pembangunan tersebut. Diharapkan masyarakat setempat semakin menyadari pentingnya menjaga lingkungan dan berkesempatan menerapkan praktik berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Partisipasi aktif yang secara asal dari masyarakat dalam melaksanakan pengambilan keputusan serta pelaksanaan proyek pembangunan desa sangat penting untuk memastikan keberlanjutan perlindungan lingkungan. Perlindungan lingkungan harus menjadi inti dari upaya menggapai kesembilan antara tiga hal penting, yakni pertumbuhan di aspek ekonomi, kesejahteraan sosial, serta pelestarian lingkungan. Namun, perubahan tata kelola pemerintahan desa saat ini belum optimal, terlihat dari adanya konflik kepentingan, kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah, serta kendala teknis di lapangan. Penelitian ini juga menghadapi tantangan dalam mengakses data berkategori sekunder tentang pembangunan desa berkelanjutan. Maka dari hal itu, perlu adanya penelitian yang sifatnya lebih mendalam dengan mempertimbangkan aspek-aspek masa depan dalam pembangunan desa berkelanjutan. Masukan dari pembaca sangat diharapkan untuk meningkatkan kualitas artikel selanjutnya.

Kata Kunci: *Pembangunan desa berkelanjutan, masyarakat, pemerintah*

ABSTRACT

This study aims to examine the technology-based community participatory approach in the context of sustainable village development. The main focus of the study is to explore the transformation of village governance with an emphasis on sustainable development aspects. The method used is descriptive qualitative with data collection or compilation through documentation. The results of the research implementation indicate that the reform of the village governance system plays an important role in achieving sustainable village development. Community involvement that pays attention to environmental aspects is the main foundation in these development efforts. It is hoped that local communities will increasingly realize the importance of protecting the environment and have the opportunity to apply sustainable practices in their daily lives. Active participation that is originally from the community in implementing decision-making and implementing village development projects is very important to ensure the sustainability of environmental protection. Environmental protection must be at the core of efforts to achieve a balance between three important things, namely growth in economic aspects, social welfare, and environmental preservation. However, changes in village governance are currently not optimal, as seen from conflicts of interest, lack of coordination between government agencies, and technical constraints in the field. This study also faces challenges in accessing secondary data on sustainable village development. Therefore, it is necessary to have a more in-depth research by considering the future aspects in sustainable village development. Input from readers is highly expected to improve the quality of the next article.

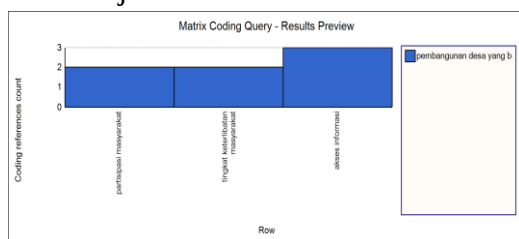
Keywords: Sustainable village development, community, government

PENDAHULUAN

Pembangunan desa berkelanjutan merupakan suatu pendekatan yang menekankan peran vital pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan (Badri, 2016). Pendekatan ini secara umum dipahami sebagai upaya untuk menggapai adanya keseimbangan antara tiga hal penting, yakni pertumbuhan di aspek ekonomi, pembangunan sosial, serta perlindungan yang dihadapkannya dengan lingkungan hidup di tingkat desa, dengan harapan tercapainya keberlanjutan ekonomi, sosial, serta lingkungan hidup yang berjangka

panjang. Konsep ini diakui sebagai langkah penting dalam proses transformasi pemerintahan desa, sesuai dengan ketentuan yang dilakukan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 kaitannya dengan Desa (Endah, 2020). Dengan meningkatnya keterlibatan masyarakat desa, diharapkan keputusan yang diambil akan lebih inklusif dan berkelanjutan. Partisipasi masyarakat ini juga memperkuat peran mereka dalam merancang dan melaksanakan program pembangunan, serta mendorong perubahan positif yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat desa secara keseluruhan.

Artikel ini bertujuan untuk memberi dorongan partisipasi aktif yang secara asal dari masyarakat desa dalam proses pengambilan keputusan kaitannya dengan pembangunan desa berkelanjutan. Dalam pembahasan berikut akan disajikan matrix coding mengenai pembangunan desa berkelanjutan.



Gambar 1: Matrix coding pembangunan desa yang berkelanjutan

Perubahan pemerintahan desa bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan desa yang berkelanjutan. Partisipasi masyarakat dapat dicapai melalui berbagai cara seperti musyawarah desa, rapat umum, serta partisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan. Selain itu, pemerintah desa harus memberikan informasi kepada penduduk desa mengenai pendanaan, kebijakan, dan program pembangunan desa secara berkelanjutan (Latif et al., 2019). Sistem pemantauan atau pelaporan pembangunan desa secara berkelanjutan memiliki pengertian sebagai sistem untuk menjamin tanggung jawab dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumber daya serta pelaksanaan proyek pembangunan desa. Proses pembangunan desa berkelanjutan

mencakup pemantauan berbagai aktivitas pemerintah daerah, termasuk alokasi penggunaan dana, implementasi kebijakan, serta kemajuan yang dapat mengurangi dampak program pembangunan desa berkelanjutan yang dilaksanakan (Abidin, 2015). Seringkali, informasi yang relevan dan transparan dikumpulkan melalui pemantauan internal maupun eksternal.

Pemerintah daerah harus membangun sistem pelaporan dengan jelas yang dilakukan secara komprehensif, sehingga dapat digunakan untuk mengumpulkan data yang akurat dan terperinci mengenai penggunaan sumber daya, hasil yang dicapai, serta hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan desa berkelanjutan. Partisipasi masyarakat merupakan bagian penting dalam pemantauan dan pelaporan pembangunan desa berkelanjutan. Partisipasi masyarakat memperkuat pemahaman akan akuntabilitas pemerintah serta memastikan bahwa keprihatinan dan aspirasi masyarakat tercermin dalam proses pengambilan keputusan (Badan Pusat Statistik, 2014). Metode ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi dan mengatasi kelemahan serta permasalahan yang timbul dalam penggunaan sumber daya dan pelaksanaan proyek. Mekanisme pemantauan dan pelaporan juga membantu memfasilitasi evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Secara keseluruhan,

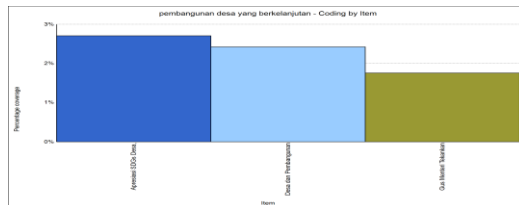
mekanisme pemantauan dan pelaporan dalam pembangunan desa berkelanjutan berperan penting dalam memastikan akuntabilitas pemerintah daerah, meningkatkan kesadaran, dan memenuhi kebutuhan serta aspirasi masyarakat lokal dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Pemerintahan desa seringkali memiliki keterlibatan masyarakat dalam bidang pengetahuan, sumber daya, dan pengalaman berharga untuk mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan (Eko et al., 2014). Dalam konteks ini, perubahan dalam pemerintahan desa bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi politik yang lebih besar dari warga desa dalam melaksanakan perencanaan serta pelaksanaan proyek pembangunan desa, yang seringkali mencakup peningkatan partisipasi yang secara asal dari masyarakat dalam melaksanakan pengambilan keputusan, pelaksanaan program pembangunan, serta pemantauan pelaksanaan kebijakan. Seringkali melibatkan warga di cakupan proses pelaksanaan pengambilan keputusan, pemerintah daerah dapat melakukan pemastian bahwa kebijakan serta program pembangunan desa didasarkan pada beragam prinsip pembangunan yang sifatnya berkelanjutan yang mencakup tiga aspek penting, yakni ekonomi, sosial, serta lingkungan (Rahman et al., 2023).

Perubahan tata kelola desa dalam menghadapi tantangan yang perlu diatasi, antara lain melemahnya pengetahuan dan pemahaman tentang

partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa berkelanjutan, melemahnya kapasitas pemerintah daerah dalam melibatkan masyarakat dalam melaksanakan pengambilan keputusan, dilaksanakannya hal ini untuk mengurangi kewenangan antara pemerintah desa dan masyarakat yang seringkali menghambat partisipasi efektif. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi aktif dalam melaksanakan pembangunan desa berkelanjutan. Diperlukan pendekatan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat untuk memperkuat pengetahuan serta pemahaman mereka kaitannya dengan peran mereka dalam proses pembangunan desa. Selain itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitasnya untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui pelatihan dan pendampingan bagi aparatur pemerintah desa. Untuk mengatasi keterbukaan kekuasaan, ada sejumlah langkah yang perlu dilaksanakan, yakni: mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi adil dalam pengambilan keputusan. Pemerintah desa harus menciptakan mekanisme yang memungkinkan masyarakat memberikan masukan, menyampaikan aspirasi, yang dapat dimanfaatkan untuk berpartisipasi secara setara dalam proses pembangunan desa berkelanjutan. Dengan upaya mengatasi tantangan pembangunan desa berkelanjutan, diharapkan partisipasi yang secara asal masyarakat di cakupan

pembangunan desa dapat ditingkatkan, keterlibatan masyarakat dapat diperkuat, serta dapat dicapai hasil yang lebih berkelanjutan dan inklusif (Kaseng, 2023). Terdapat chart coding pada pembangunan desa berkelanjutan, dapat dilihat pada pembahasan berikut.



Gambar 2: Chart coding pembangunan desa yang berkelanjutan

Analisis Pembangunan Desa yang berkelanjutan seringkali menggunakan chart coding, analisis inilah merupakan visualisasi yang diolah melalui nvivo 12 plus, hal ini digunakan, karena dapat memunculkan ide ataupun inisiatif pada suatu gagasan yang terdapat pada perubahan pemerintahan desa, seringkali meningkatkan sistem tata kelola yang baik dari bidang pemerintahan terkait. Analisis apresiasi SDGs Desa yang menggunakan chart coding pada nvivo 12 plus merupakan proses evaluasi dan pemahaman terhadap implementasi yang memiliki dampak SDGs di tingkat desa (Taufik, 2022). Dengan adanya chart coding dapat memudahkan akses pengguna dalam menganalisis data berupa apresiasi SDGs desa sebesar 2,8%.

Untuk itu, diperlukannya partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa yang berkelanjutan. Selanjutnya, terdapat analisis desa serta adanya pembangunan berkelanjutan yang mencapai angka 2,5%, serta terdapat 1,8% pada analisis yang

menekankan pembangunan desa dapat mencapai angka 1,8% terletak pada tujuan pembangunan desa berkelanjutan pada tahun selanjutnya.

Selain itu, analisis chart coding sering digunakan sebagai analisis data dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi, pembangunan desa, stabilitas yang ada, serta meningkatkan kesejahteraan nasional itu menjadi poin pertama dalam tercapainya pembangunan desa yang berkelanjutan di suatu wilayah yang ada di Indonesia (Mayasari. Riana. F. Jovan, Rahmanda Putra. R. Hendra Hadiwijaya., 2022) Bagaimana implementasi Undang-Undang desa memengaruhi dinamika politik lokal dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang berkelanjutan?

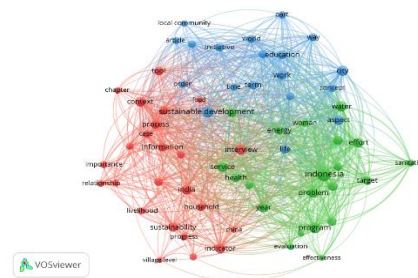
KAJIAN PUSTAKA

Penelitian ini membahas mengenai pendekatan partisipatif berbasis teknologi. penelitian terdahulu berfokus pada perubahan tata kelola pemerintahan desa berbasis pembangunan desa yang berkelanjutan seringkali menerapkan analisis keterlibatan politik yang ada pada pembangunan desa. Pembangunan perdesaan yang basisnya internet ini dilaksanakan melalui proses yang dilakukan perencanaan dengan cara bertahap (Badri, 2016). Pembangunan desa secara tujuan untuk memberi peningkatan kesejahteraan yang dipunyai masyarakat desa serta kualitas hidup manusianya (Roza, 2018). Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakannya dalam suatu upaya

untuk melakukan percepatan serta peningkatan kualitas layanan, pembangunan, serta pemberdayaan yang dihadapkannya dengan masyarakat Desa di cakupan kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan yang sifatnya parsitipatif (Febrian, 2016). Desa Panggunharjo sudah mampu melahirkan embrio inovasi, memberi dorongan penguatan kelembagaan inovasi serta budaya inovasi pembentukan jaringan inovasi (interaksi antar pelaku kepentingan) serta pemanfaatan IPTEK dan responsivitas atas beragam isu global (Prasetyanti & Kusuma, 2020).

Penerapan pembangunan yang secara sifat berkelanjutan di Indonesia sudah masuk di tahapan desa dengan penerapan SDGs desa yang melakukan pengarah pembangunan desa berkelanjutan. Penelitian ini secara tujuan untuk melakukan penggalian pemahaman kaitannya dengan proses pembangunan desa yang secara sifat berkelanjutan serta sedang menjadi tren di seluruh dunia (Hariyoko, 2022). Pengabdian di masyarakat untuk memberi peningkatan pemahaman masyarakat dihadapkannya dengan tata kelola desa serta melakukan perbaikan proses seleksi perangkat desa (Indarti & Riono, 2023). Perubahan keadaan di aspek internal serta eksternal yang terjadi memberi tuntutan adanya kebijakan yang secara nilai tepat dari para pihak pembuat kebijakan dalam upaya untuk melakukan pengembangan potensi wilayah di cakupan pedesaan (Soleh, 2017). Rencana pembangunan desa yang ada saat ini belum selaras

dengan rencana pembangunan daerah atau provinsi. Hal ini disebabkan sebab pemilik desa tidak mengetahui dalam melakukan rencana tata ruang serta rencana pembangunan wilayah desanya yang tercantumnya dalam RT/RW serta RPJMD kabupaten (Rohiani, 2021). Terdapat gambar SDGs dalam pembangunan desa yang berkelanjutan.



Gambar 3: SDGs pembangunan desa berkelanjutan

Pada gambar 3, menunjukkan network analysis terkait dengan scopus database pada tema SDGS and Village dengan jumlah artikel 189 artikel pada rentang waktu 2020 hingga 2024. Pada hasil analisis Vos Viewer menunjukkan terkait dengan tema Sustainable Development memiliki keterkaitan dengan local community atau komunitas lokal pada satu kluster warna yang sama, mengindikasikan adanya keterkaitan antara kedua tema tersebut. Disisi lainnya terdapat tema sustainability dengan village level pada satu cluster warna yang sama menunjukkan bahwa konektivitas pada tema tersebut. Pada penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penelitian terdahulu masih berfokus pada penerapan SDGS secara umum dalam lingkup desa, belum merujuk pada

spesifik kasus tertentu. Pemerintahan di tingkatan desa yang bernilai baik ialah suatu kerangka institusional untuk melakukan penguatan otonomi desa sebab secara aspek substantif desentralisasi serta otonomi desa bukan hanya masalah pembagian wewenang antara level pemerintahan, tetapi menjadi upaya yang menjadikan pemerintah bisa lebih dekat dengan pihak Masyarakat (Abustan, 2019). Pengembangan desa menawarkan penelitian melalui pengembangan wisata pertanian di Desa Bumiaji yang sudah diterapkan dalam beragam aspek, antara lain: pengembangan sumber daya manusia atau yang disingkat menjadi (SDM), terkhusus dengan bantuan pengusaha pariwisata seringkali memiliki peran sebagai wirausaha yang lebih dimainkan oleh masyarakat lokal, khususnya pemilik potensi wisata pertanian, adanya periklanan bersifat langsung atau juga tidak langsung, serta dukungan sarana serta prasarana (Ulfah et al., 2017).

Undang-Undang Desa menetapkan amanah bagi pemerintahan di tingkatan desa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang berkualitas. Salah satu dari indikator keberhasilan dalam mencapai tata kelola yang baik ialah akuntabilitas pemerintah desa serta memberikan beragam hak yang dipunyai warga desa (Ra'is, 2022). Teori pembangunan berkelanjutan diturutkan dengan pendapat Von Stoker mencakup sejumlah tiga aspek utama, yaitu aspek ekologi, sosial, serta ekonomi. Hasil dari pelaksanaan penelitian memberi petunjuk bahwa

proses pembangunan di Desa Bumiaji sudah melakukan pemenuhan ketiga aspek tersebut, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yang menghambat optimalisasi (Ulfah et al., 2017). Mahasiswa diharapkan dapat menerapkan pengetahuan yang dimiliki secara kolaboratif dengan Pemerintah Desa dan elemen masyarakat lainnya untuk melaksanakan pembangunan desa, mendukung perubahan dan perbaikan di aspek tata kelola desa, serta mempercepat pembangunan di daerah pedesaan (Tui dan Ilato, 2021). Penelitian ini fokus pada tiga aspek prioritas dalam pengabdian, yaitu sumber daya manusia, infrastruktur, dan partisipasi masyarakat. Solusi untuk permasalahan sumber daya manusia akan dilaksanakan melalui sosialisasi kaitannya dengan manajemen pengelolaan desa wisata serta peningkatan literasi terkait pengembangan desa wisata kepada masyarakat lokal (Aeni et al., 2021).

Upaya untuk melahirkan penyelenggaraan pengelolaan desa wisata yang basisnya pembangunan berkelanjutan di Desa Wonocolo, Kabupaten Bojonegoro, memuat aspek kelembagaan yang ideal (Hardiyanti dan Diamantina, 2022). Dalam hal transparansi informasi publik desa, telah diterapkan sistem informasi desa yang mencakup sistem pengolahan data terkomputerisasi untuk mengelola data kependudukan, informasi rumah tangga, tipografi, kesekretariatan, energi domestik, sosialisasi, serta pembuatan laporan bulanan (Huda et al.

, 2020). Namun pembangunan desa belum bisa berjalan dengan cara optimal yang disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain keterbatasan di sumber daya manusia, kelembagaan desa yang secara nilai belum kompeten, kurangnya partisipasi yang secara asal dari masyarakat desa, serta tidak adanya sistem regulasi yang bisa memberi dorongan kemandirian desa (Yanuarsari et al., 2021). Lemahnya pembangunan desa juga disebabkan oleh kurangnya kejelasan mengenai pentingnya peraturan yang mendukung pariwisata pengembangan pedesaan secara berkelanjutan (Hermawan et al., 2023).

Peningkatan tingkat kualifikasi masyarakat pedesaan dapat terdiri dari peningkatan literasi teknologi informasi dalam kaitannya dengan pembangunan pedesaan bukan hanya peningkatan pendidikan formal (Zen Munawar et al., 2023). Strategi yang dapat dilakukan dalam mengembangkan desa wisata berkelanjutan, diantaranya: mengoptimalkan sumber daya lokal, pelibatan masyarakat, berpegang pada master plan yang telah direncanakan, mengelola pendanaan yang bersumber dari internal, memperkuat kelembagaan, menjadikan pengembangan wisata desa sebagai prioritas, meningkatkan kemampuan menjual produk wisata desa yang diberi dukungan dengan SDM yang secara nilai kompeten yang melakukan pemenuhan standar pelayanan prima serta adanya motivasi pengembangan terus menerus untuk melakukan kebaruan (Sukaris et al., 2023). Pada penelitian terdahulu memiliki gap yaitu

Pembangunan Desa yang berkelanjutan. Penelitian ini mencoba mengisi gap literature tersebut dengan berfokus pada analisis pembangunan Desa yang berkelanjutan. Terdapat indikator penelitian pada penjabaran tabel 1.

Tabel 1: Indikator penelitian

Variabel	Indikator	Parameter
Partisipasi masyarakat	Tingkat keterlibatan masyarakat	Tingkat keterlibatan masyarakat
		Penduduk desa yang aktif berpartisipasi dalam forum musyawarah desa
		Keanggotaan dalam organisasi dan kelompok masyarakat
	Akses informasi	Akses informasi
		Jangkauan saluran komunikasi
		Keterbukaan informasi

Sumber: Diolah oleh penulis, 2025

METODE

Penelitian ini mempergunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yang fokusnya pada pembangunan desa berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan data kepustakaan berupa pustaka dan artikel jurnal, buku, serta berita dalam 5-10 tahun terakhir. Tahapan penelitian ini adalah Pengumpulan Data, yang bertujuan untuk mengumpulkan data sekunder; tahap kedua Reduksi Data, yang bertujuan untuk menyeleksi data yang telah terkumpul sebelumnya. Tahap selanjutnya ialah analisis data, yang secara tujuan untuk melaksanakan

pengkategorian serta analisis data yang sudah direduksi. Tahap terakhir adalah Penarikan Kesimpulan, yang bertujuan untuk menarik makna dan nilai dari data yang sudah dijelaskan. Dengan demikian, penelitian ini terbagi menjadi empat tahap, yaitu: 1) Pengumpulan, yang bertujuan untuk mengumpulkan data berupa buku, grafik, dan artikel ilmiah yang sesuai dengan tema penelitian; 2) Reduksi Data, yang secara tujuan untuk melakukan pemilihan serta menyeleksi data yang relevan dengan tujuan penelitian serta merumuskan masalah; 3) Analisis Data, yang ialah tahapan bersifat penting di mana data dilaksanakan analisis untuk mendapat nilai serta makna guna menjawab rumusan masalah; 4) Penarikan Kesimpulan, yang dilaksanakan untuk menggeneralisasikan hasil yang sudah diperoleh. Alur tahapan penelitian dijelaskan dalam gambar.



Gambar 4: Tahapan Penelitian

Untuk mendapatkan informasi lebih mendalam tentang pembangunan desa yang berkelanjutan dari subjek pertama kepada subjek lain yang serupa. Teknik analisis data kualitatif deskriptif digunakan untuk mengidentifikasi: pola, tema, dan wawasan terkait pembangunan desa yang berkelanjutan melalui menggunakan data literatur berupa data pustaka serta data artikel jurnal, buku serta berita. Proses ini memberi bantuan untuk melaksanakan perancangan perubahan tata kelola

pemerintahan desa yang sesuai dengan konteks lokal, dengan sejumlah langkah: pengumpulan atau penghimpunan data, reduksi data, analisis menggunakan Vosviewer, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendekatan pembangunan desa berbasis masyarakat berfokus pada pemahaman mendalam tentang kebutuhan, aspirasi dan kekuatan masyarakat lokal. Masyarakat lokal memiliki pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya yang berharga seringkali digunakan untuk memecahkan masalah dan mencapai pembangunan berkelanjutan (Aisa et al., 2023). Tujuan utama pendekatan pembangunan masyarakat ialah untuk memberi peningkatan kualitas hidup masyarakat desa secara berkelanjutan. Hal ini berfokus pada berbagai aspek pembangunan, termasuk peningkatan ekonomi, akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pemberdayaan perempuan, peningkatan partisipasi politik dan peningkatan kualitas lingkungan.

Pendekatan ini didasarkan pada pengakuan bahwa pendekatan pembangunan yang bersifat top down mengalami kegagalan, untuk itu, perlu diterapkannya solusi dalam mengatasi permasalahan sosial karena kurangnya partisipasi aktif masyarakat dan kurangnya pemahaman mendalam terhadap kondisi lokal. Hal ini digunakan untuk mendorong

terciptanya forum inklusif seperti kelompok masyarakat, komite desa dan kelompok masyarakat dimana masyarakat dapat berdiskusi, berbagi informasi dan mengambil keputusan bersama. Selain itu, terdapat pendekatan bottom up yang efektif untuk membantu masyarakat mengambil tanggung jawab dalam mengidentifikasi dan mengelola sumber daya mereka sendiri serta merencanakan dan melaksanakan proyek pembangunan. Seringkali masyarakat didorong untuk berkolaborasi dengan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, serta sektor swasta untuk mencapai tujuan pembangunan bersama (Suaib, 2023).

Pendekatan pembangunan berkelanjutan berbasis sumber daya memainkan peran penting dalam mencapai tujuan ini, dengan fokus pada pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan di tingkat desa. Pendekatan ini menekankan pentingnya mengintegrasikan faktor ekonomi, sosial serta lingkungan dalam melaksanakan pengambilan keputusan serta tindakan terkait pengelolaan sumber daya desa. Pendekatan ini memerlukan integrasi faktor ekonomi, sosial serta lingkungan dalam melaksanakan pengambilan keputusan dan tindakan terkait pengelolaan sumber daya desa. Hal ini akan memastikan bahwa pembangunan desa tidak hanya terfokus pada pertumbuhan ekonomi, namun juga kesejahteraan sosial dan lingkungan. Partisipasi masyarakat lokal dalam melaksanakan

pengambilan keputusan serta program pembangunan desa sangatlah penting.

Pendekatan ini mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan rencana pengelolaan sumber daya alam, mengidentifikasi kebutuhan serta aspirasi mereka serta memastikan keberlanjutan proyek pembangunan. Selain dari hal itu, kolaborasi antara pihak pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan organisasi lainnya dalam menerapkan pendekatan ini. Kemitraan yang kuat dapat memberi peningkatan akses dihadapkannya dengan sumber daya dan dukungan teknis serta mendorong pertukaran pengetahuan dan pengalaman (Triani & Novani, 2023). Terdapat peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pada pembahasan selanjutnya.

Pembangunan pedesaan berkelanjutan sudah menjadi prioritas utama peruntukannya bagi banyak negara di dunia. Secara hakikat, tujuan dari pelaksanaan pembangunan desa berkelanjutan ialah untuk memberi peningkatan kualitas hidup serta kesejahteraan yang dipunyai masyarakat di tingkat lokal dengan melakukan pelestarian sumber daya alam serta kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal dengan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan. Salah satu aspek penting dalam kualitas hidup yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah akses dasar terhadap air bersih, sanitasi, pendidikan, dan layanan kesehatan. Untuk membangun desa secara berkelanjutan, penting bagi

seluruh penduduk desa untuk memiliki akses terhadap layanan-layanan ini. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui pembangunan infrastruktur yang memadai dan program pembangunan yang jelas Sasarannya.

Pembangunan desa yang berkelanjutan harus didukung oleh pembangunan ekonomi lokal yang kuat. Hal ini melibatkan pemberdayaan masyarakat lokal untuk mengembangkan potensi ekonomi mereka, seperti pertanian berkelanjutan, industri kreatif, dan ekowisata. Peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja di tingkat lokal akan meningkatkan penghidupan masyarakat secara signifikan (Amalia & Syawie, 2016). Terdapat analisis variabel pada pembahasan berikutnya.

Tingkat keterlibatan masyarakat

Pembangunan desa berkelanjutan menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat lokal dalam proses pembangunan. Partisipasi masyarakat yang lebih besar dianggap sebagai kunci untuk mencapai tujuan pembangunan desa. Hal ini memastikan bahwa solusi dikembangkan berdasarkan kebutuhan serta aspirasi yang secara asal dari masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam perencanaan pembangunan desa yang berkelanjutan. Seringkali mencakup diskusi terbuka, lokakarya dan konsultasi multi pihak untuk menentukan tujuan pembangunan, menetapkan target dan merumuskan strategi. Partisipasi masyarakat memastikan solusi yang dikembangkan memenuhi kebutuhan dan aspirasi mereka, serta

meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat (Alifa et al., 2023).

Untuk meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat, desa sering memberikan pelatihan dan pendidikan yang diberikan masyarakat terkait pentingnya pembangunan berkelanjutan dan bagaimana berpartisipasi dalam program tersebut. Pelatihan ini mencakup berbagai topik, termasuk pengelolaan sumber daya lingkungan, teknologi terbarukan, dan kesehatan lingkungan. Dengan pendidikan yang baik, masyarakat menjadi lebih terinformasi dan mendukung inisiatif pembangunan berkelanjutan. Selain itu, masyarakat mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi dalam program kesehatan dan pendidikan. Partisipasi masyarakat dalam beragam program tersebut tidak hanya memberi peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, namun juga memperkuat partisipasi dari masyarakat dalam pembangunan desa berkelanjutan.

Pembangunan desa berkelanjutan memiliki anggota organisasi dan kelompok masyarakat yang terlibat dalam pembangunan desa seringkali organisasi dan kelompok ini bekerja untuk mengkoordinasikan upaya, mengumpulkan sumber daya, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan berkelanjutan.

Organisasi pembangunan desa merupakan organisasi formal yang bertujuan untuk mengkoordinasikan kegiatan pembangunan desa berkelanjutan.

Anggota organisasi ini adalah para pemangku kepentingan desa, seperti kepala desa, kepala desa, serta masyarakat desa yang punya keterkaitan dalam pembangunan. Organisasi ini bertanggung jawab merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pembangunan berkelanjutan serta memastikan bahwa program tersebut memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Terdapat akses informasi pada pembahasan selanjutnya.

Akses informasi

Akses informasi pembangunan desa berkelanjutan merujuk pada kemampuan masyarakat lokal termasuk penduduk, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi lainnya, untuk mendapat informasi yang relevan, akurat serta tepat dalam kaitannya dengan isu pembangunan desa. Informasi ini mencakup data, statistik, kebijakan, program dan proyek yang kaitannya dengan pembangunan ekonomi, sosial serta lingkungan kota. Desa berkelanjutan memberikan informasi yang jelas mengenai proyek pembangunan yang sedang berjalan. Informasi ini mencakup tujuan, sasaran dan hasil yang diharapkan. Masyarakat dapat mengakses informasi ini melalui berbagai cara, termasuk situs web kota, buletin, dan media sosial. Kebijakan pembangunan berkelanjutan di pedesaan harus mencakup informasi mengenai kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, seperti kebijakan pengelolaan hutan, kebijakan energi terbarukan, dan kebijakan

pengelolaan air. Informasi ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan mendukung pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukannya prinsip SDGs dalam penerapan desa cerdas yang bertujuan untuk menciptakan desa berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan hidup warganya. Prinsip SDGs mencakup enam pilar utama dalam pembangunan desa cerdas, seperti: masyarakat cerdas, ekonomi cerdas, pemerintahan cerdas, lingkungan cerdas, kehidupan cerdas, serta mobilitas cerdas.

Jangkauan saluran komunikasi dalam pembangunan desa berkelanjutan mencakup banyak metode dan strategi yang digunakan untuk menjamin efektifnya aliran informasi, partisipasi dan kerjasama antara seluruh aktor yang terlibat dalam pembangunan desa. Saluran komunikasi yang baik penting karena saluran tersebut menjadi dasar bagi pertukaran ide, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang adil dan konsisten. Hal ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran, mengurangi kesenjangan komunikasi, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memperkuat kerja sama antar seluruh pemangku kepentingan. Saluran komunikasi yang kuat dapat membantu desa mengatasi tantangan pembangunan, mendorong inovasi dan mencapai tujuan pembangunan desa berkelanjutan.

Di era digital saat ini, terdapat jejaring sosial yang telah menjadi saluran komunikasi di kalangan masyarakat dan sangat cocok untuk

pembangunan desa yang berkelanjutan. Melalui jejaring sosial, memiliki informasi mengenai proyek pembangunan desa dapat dengan cepat disebarluaskan kepada masyarakat, membantu mereka berpartisipasi aktif dalam melaksanakan kebijakan dan program pembangunan yang dikelola oleh pemerintah daerah. Selain itu, acara kemasyarakatan yang diselenggarakan dalam konteks pembangunan desa berkelanjutan juga memberikan peluang berharga untuk menarik dukungan masyarakat dan memungkinkan mereka berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Hal ini, dapat dicontohkan seperti: pertemuan desa, forum partisipatif atau kegiatan kolaboratif dapat memperkuat hubungan antar pemangku kepentingan dan meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif dalam upaya pembangunan berkelanjutan. Selain acara komunitas dan media sosial, situs web dan platform online juga berperan penting dalam memberikan informasi penting kepada komunitas, pemerintah kota, dan pembuat kebijakan sumber daya alam (Pratiwi et al., 2023).

Melalui website dan platform online, dapat memudahkan masyarakat dapat mengakses data, laporan dan informasi terkait proyek pembangunan desa kerajinan berkelanjutan. Seringkali diperlukannya situs web dan platform online juga dapat digunakan sebagai alat untuk memobilisasi dukungan masyarakat, memfasilitasi debat publik, dan mendorong partisipasi aktif dalam upaya pembangunan berkelanjutan di desa. Dengan memanfaatkan media

sosial, acara komunitas, website dan platform online secara efektif, pembangunan desa berkelanjutan dapat mencapai jangkauan komunikasi yang lebih luas, partisipasi inklusif yang lebih besar dan kontribusi yang lebih beragam dari seluruh pemangku kepentingan.

Pembangunan desa berkelanjutan menyadari pentingnya menjamin kelestarian lingkungan sebagai landasan utama kegiatan pembangunan. Perlindungan lingkungan hidup merupakan inti upaya menggapai keseimbangan antara tiga hal, yakni pertumbuhan di aspek ekonomi, kesejahteraan sosial, serta kesejahteraan lingkungan hidup. Mencapai perlindungan lingkungan dalam pembangunan desa berkelanjutan memerlukan kolaborasi yang sifatnya kuat antara pihak pemerintah, masyarakat dengan sektor swasta. Pemerintah harus menetapkan kebijakan dan undang-undang yang mendukung perlindungan lingkungan, dan masyarakat serta sektor swasta dapat berperan aktif dalam menerapkan praktik berkelanjutan dan mengembangkan rencana lingkungan. Kombinasi ketiga kelompok ini akan memperkuat upaya perlindungan lingkungan dalam pembangunan desa berkelanjutan (Sundari et al., 2021). Terdapat word cloud pada pembahasan selanjutnya.



Gambar 5: Word Cloud Nvivo

Analisis ini menunjukkan bahwa pembangunan desa yang berkelanjutan tidak hanya bergantung pada aspek fisik seperti infrastruktur yang baik, tetapi juga melibatkan aspek sosial dan teknologi yang saling terkait. Dengan mengenali pilar-pilar utama seperti sosial, lingkungan, ekonomi, partisipasi masyarakat, dan kemajuan teknologi, penelitian ini memberikan dasar konsep yang jelas untuk membuat kebijakan atau strategi pelaksanaan yang lebih terarah.

KESIMPULAN

Pembangunan desa berkelanjutan merupakan pendekatan yang menekan pemerintah desa dalam menjalankan peranan penting dalam pembangunan desa yang berkelanjutan. Hal ini diakui sebagai langkah penting dalam menjaga pemerintahan dari desa ke desa, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 kaitannya dengan Desa. Perubahan pemerintahan desa bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan dan melaksanakan program pembangunan desa yang berkelanjutan. Partisipasi masyarakat dapat tercapai melalui berbagai cara seperti: musyawarah desa, rapat umum dan partisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan. Selain itu, pemerintah desa harus memberikan informasi kepada masyarakat desa mengenai pendanaan, kebijakan dan program pembangunan desa secara berkelanjutan. Penelitian ini masih terdapat kekurangan dalam memperoleh

data sekunder yang terkait dengan perubahan tata kelola pemerintahan desa pada pembangunan desa yang berkelanjutan. Oleh karena itu, akan lebih mudah untuk memahami perubahan dalam pengelolaan kota. Namun pembangunan desa berkelanjutan belum tercapai karena adanya konflik kepentingan, kurangnya partisipasi masyarakat sekitar serta tindakan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, MZ (2015). Tinjauan atas Implementasi Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 6(1), 61-76.
- Abustan. (2019). Implementasi Percepatan Pembangunan Desa dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. [https://Journal.Unilak.Ac.Id/Index.Php/Gh/IMPLEMENTASI,01\(02\),216-227](https://Journal.Unilak.Ac.Id/Index.Php/Gh/IMPLEMENTASI,01(02),216-227).
- Aeni, I.N., Mahmud, A., Susilowati, N., & Prawitasari, A.B. (2021). Sinergitas BUMDes dalam Manajemen Pengelolaan Desa Wisata Menuju Pariwisata Berkelanjutan. *Jurnal Abdimas*, 25(2), 169-174. <https://doi.org/10.15294/abdima.s.v25i2.33355>
- Aisa, R., Dewi, K.P., Dewi, N.P., & Rizkianti, D. (2023). Interaksi Sosial dalam Konteks Ekonomi: Dampaknya Terhadap

- Pembangunan Desa. Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(5), 320-329. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8016431>
- Alifa, N.N., Shabihah, AS, Noor, V.V., & Humaedi, S. (2023). Peran Mahasiswa dalam Pengembangan Desa Melalui Perspektif Community Development. Fokus : Jurnal Pekerjaan Sosial, 6(1), 202. <https://doi.org/10.24198/focus.v6i1.49129>
- Amalia, AD, & Syawie, M. (2016). Pembangunan Kemandirian Desa Melalui Konsep Pemberdayaan: Suatu Kajian dalam Perspektif Sosiologi. Sosio Informa, 1(2), 175-188. <https://doi.org/10.33007/inf.v1i2.146>
- Badan Pusat Statistik. (2014). Kajian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Kajian Indikator Lintas Sektor, 1-162.
- Badri, M. (2016). Pembangunan Kemandirian Desa Melalui Konsep Pemberdayaan: Kajian dalam Perspektif Sosiologi. Sosio Informa. Jurnal Risalah, 27(2), 62-73. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/risalah/article/view/2514>
- Eko, S., Khasanah, T.I., Widuri, D., Handayani, N., Qomariyah, P., Aksa, S., & Kurniawan, B. (2014). Desa Membangun Indonesia.
- Endah, K. (2020). Pemberdayaan Masyarakat: Menggali Potensi Lokal Desa. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 6(1), 135-143. <https://jurnal.unigal.ac.id/moderat/article/view/3319/2914>
- Febrian, RA (2016). Collaborative Governance dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan (Tinjauan Konsep dan Regulasi). Jurnal Kajian Pemerintah, II, 200-208. <http://journal.uir.ac.id/index.php/wedana/article/view/1824> diakses pada tanggal 5 April 2019 pukul 02:55 WIB
- Hardiyanti, M., & Diamantina, A. (2022). Urgensi Otonomi Desa dalam Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Pembangunan Berkelanjutan. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 8(1), 334-352. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.44410>
- Hariyoko, Y. (2022). Kajian Literatur Sistematis Pembangunan Desa Berkelanjutan: Analisis pada Basis Data Scopus Penelitian Tahun 2018 sampai 2021. Jurnal Kebijakan Pembangunan, 17(2), 209-218. <https://doi.org/10.47441/jkp.v17i2.264>
- Hermawan, S., Subekti, R., Sungkowo Raharjo, P., Nugroho, A., Indar Surya Kusuma, F., & Hukum Administrasi Negara, B. (2023). Krida Cendekia Pendampingan Perumusan Peraturan Desa dalam Rangka Mendukung Pembentukan Pariwisata Desa

- Berkelanjutan di Desa Daleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, 2(2).
- Huda, H.A., Suwaryo, U., & Sagita, N.I. (2020). Pengembangan Desa Berbasis Smart Village. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(3), 450.
- Indarti, N., & Riono, S.H. (2023). Optimalisasi Tata Kelola Desa: Evaluasi Mendalam terhadap Proses Seleksi Perangkat Desa. *Jurnal Bangun Abdimas*, 2(2), 158-161. <https://doi.org/10.56854/ba.v2i2.259>
- Kaseng, ES (2023). Analisis Pendekatan Komunikasi Partisipatif Lembaga Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Berkelanjutan. *JEEP: Jurnal Ekonomi dan Riset Pembangunan*, 1(3), 42-52. <https://jurnalprofau.com/index.php/JERP>
- Latif, A., Irwan, Rusdi, M., Mustanir, A., & Sutrisno, M. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Timoreng Panua, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal MODERAT*, 5(1), 1-15. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/1898>
- Mayasari, Riana F., Jovan Rahmanda Putra, R. Hendra Hadiwijaya, & K.D. (2022). Digitalisasi Desa Pilar Pembangunan Ekonomi Desa (Moh. Nasrudin (ed.); cetakan pe). PT Nasya Memperluas Manajemen.
- Prasetyanti, R., & Kusuma, B.M.A. (2020). Quintuple Helix dan Model Desa Inovatif (Studi Kasus Inovasi Desa di Desa Panggungharjo, Yogyakarta). *Administrator Jurnal Borneo*, 16(3), 337-360. <https://doi.org/10.24258/jba.v16i3.719>
- Pratiwi, C., Yunarti, S., & Komsiah, S. (2023). Peran Mahasiswa dalam Kelestarian Lingkungan dengan Memanfaatkan Media Sosial. *Sosial dan Humaniora*, 7(3), 390-404.
- Ra'is, DU (2022). Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik melalui Penerapan Akuntabilitas Sosial. *Jurnal Sosiologi Perkotaan*, 5(2), 109. <https://doi.org/10.30742/jus.v5i2.2577>
- Rahman, A., Wasistiono, S., Riyani, O., & Tahir, I. (2023). Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Ekonomi: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 7(2), 1461. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i2.1492>
- Rohiani, A. (2021). Perencanaan Penataan Ruang Desa Berbasis Potensi Desa sebagai Kendali Pembangunan Desa yang Terarah dan Berkelanjutan. *Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan*

- Pedesaan, 5(1), 15-27.
<https://doi.org/10.29244/jp2wd.2021.5.1.15-27>
- Roza, DSLA (2018). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Jurnal Hukum)*, 4(3), 606-624.
<https://doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a10>
- Soleh, A. (2017). Strategi Pengembangan Potensi Desa . *Jurnal Sungkai*, 5(1), 32-52.
- Suaib. (2023). Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat. [https://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/1250/1/PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN.pdf](https://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/1250/1/PEMBANGUNAN_DAN_PEMBERDAYAAN.pdf)
- Sukaris, S., Kurniawan, A., & Kurniawan, M.D. (2023). Strategi Pengembangan Wisata Desa yang Berkelanjutan. *Jurnal Manajerial*, 10(01), 17.
<https://doi.org/10.30587/jurnalmanajerial.v10i1.4751>
- Sundari, A., Asi, Y.S., & Bilgies, AF (2021). Peran Filsafat Ilmu terhadap Ilmu Ekonomi sebagai Landasan Rekonstruksi Ekonomi Pancasila. *HUMANIS: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, 13(2), 179-192.
<https://doi.org/10.52166/humanis.v13i2.2485>
- Taufik, M.N.B. (2022). Strategi Komunikasi Pemberdayaan Desa Wisata Kemiren dalam Upaya Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. *Komersial*, 6(1), 21-33.
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/Commercium/article/view/49269/40974>
- Triani, R., & Novani, S. (2023). Menciptakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) melalui Value Co-Creation dalam Akuakultur Darat di Indonesia. *TheJournalish: Sosial dan Pemerintahan*, 4(5), 292-308.
- Tui, FP, & Ilato, R. (2021). Penguatan Potensi Kelembagaan Desa Menuju Percepatan Pencapaian Pembangunan Desa Berkelanjutan. *Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat)*, 1(2), 331-347.
- Ulfah, I.F., Setiawan, A., & Rahmawati, A. (2017). Pembangunan Desa Berbasis Potensi Lokal Agrowisata di Desa Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. *Politik Indonesia: Kajian Ilmu Politik Indonesia*, 2(1), 46.
<https://doi.org/10.15294/jpi.v2i1.8486>
- Yanuarsari, R., Asmadi, I., Muchtar, H.S., & Sulastini, R. (2021). Peran Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam Meningkatkan Kemandirian Desa. *Jurnal Basicedu*, 5(6), 6307-6317.
<https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i6.1828>
- Zen Munawar, Novianti Indah Putri, Rita Komalasari, Iswanto, Hernawati, & Andina Dwijayanti. (2023). Program

Desa Cerdas untuk Mendukung
Keberlangsungan Rencana
Strategis Desa. Darma Abdi
Karya, 2(1), 11-20.
[https://doi.org/10.38204/darmaa
bdikarya.v2i1.1345](https://doi.org/10.38204/darmaa
bdikarya.v2i1.1345)